

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *good governance* dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bantul, peneliti dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut :

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Good governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Ketika penyelenggaraan pemerintahan desa dirancang dan dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas *good governance* maka aparatur pemerintah desa akan melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukurannya, atau dengan kata lain memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.
2. Penerapan SPIP tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini diduga karena kurangnya sosialisasi, pembinaan maupun pelatihan mengenai SPIP yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada aparatur pemerintahan desa. Peraturan maupun undang-undang yang mengatur penerapan SPIP secara khusus untuk desa belum tersedia.

Dengan melihat kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka sesuai dengan tujuannya penelitian ini menunjukkan beberapa kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghazalah (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah desa, konsiten dengan hasil penelitian Ghazalah (2016) yang menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis yang tidak terdukung dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan SPIP terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diduga disebabkan oleh adanya perbedaan instansi pemerintahan yang dipakai. Meskipun penelitian dilakukan dengan variabel dan metode yang sama akan tetapi terdapat perbedaan karakter antar instansi pemerintahan yang menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada aparatur pemerintah desa, hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman terhadap butir-butir pertanyaan yang diajukan. Responden mengukur sendiri tingkat kinerjanya sehingga pengukuran bersifat *self reported*. Penggunaan kuesioner juga memunculkan kemungkinan respon bias

dari responden yang tidak jujur dan tidak serius dalam mengisi kuesioner.

2. Penelitian dilakukan terhadap 10 desa di Kabupaten Bantul, dan disebarakan kepada 6 aparatur pemerintah di masing- masing desa. Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Bantul dan jumlah aparatur pada masing- masing desanya. Hal ini menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk dijadikan kesimpulan umum bagi penelitian yang sejenis.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan obyek dan subyek penelitian yang lebih luas, sehingga dapat lebih menggeneralisasi. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dapat diperkaya dengan metode pengumpulan data yang lain seperti wawancara dan observasi untuk menghindari bias dan ketidakseriusan pengisian kuesioner.
2. Bagi aparatur pemerintah desa dan lembaga maupun organisasi pemeritah terkait dapat memunculkan kembali semangat penerapan asas-asas SPIP dan *good governance* dalam penyusunan program maupun kebijakan yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus untuk penerapan dan pelaksanaan SPIP perlu diperhatikan kembali, tidak hanya pada tataran sosialisasi akan tetapi perlu disusun untuk instrumen-instrumen kelengkapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2013). *Penaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- BPKP. (2015). *Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Government : Kawal Keuangan Desa*. Jakarta : BPKP
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta
- Ghazalah, R.K.. (2016). *Pengaruh Good Governanca dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ghozali, H. I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Syam, K. M. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah (Edisi 2)*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Hartono, J. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Indra, P.I, dan Gayatri. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Kinerja Individu dengan Pemoderasi Motivasi Kerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance*. Jakarta
- Mahmudi. (2016). *Akutanasi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta
- Mahsun, M. (2007). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* . Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Nordiawan, dan Hertianti (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Pangestika, F. (2016). *Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sedarmayanti, (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance : Kepemerintahan yang Baik & Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. Bandung : Penerbit Mandar Maju

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widyatama, A. Arif. dan Dearespati Novita, L (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 2 No 2*.

Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

**Referensi Internet :**

<http://www.bpkp.go.id/diy/berita/read/19513/0/Audit-Kinerja-Desa-Mendorong-Kompetisi-Kinerja-Antar-Desa.bpkp>. Diakses 6 Maret 2018

<http://inspektorat.bantulkab.go.id/berita/307-rapat-koordinasi-persiapan-pemeriksaan-kinerja-pemerintahan-desa>. Diakses 6 Maret 2018

<https://jogja.antaranews.com/berita/343970/pemkab-sleman-evaluasi-kinerja-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>. Diakses 6 Maret 2018

<https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>. Diakses 8 Maret 2018

<https://kbbi.web.id/desa>. Diakses 6 Maret 2018

<https://kbbi.web.id/kinerja>. Diakses 6 Maret 2018

<https://ksp.go.id/membangun-desa-implementasi-nyata-nawacita/index.html>..  
Diakses 6 Maret 2018.

<https://bangunjiwo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/696-Desa-Bangunjiwo-Rangking-4-tentang-Kinerja-Pemerintah-Desa-Hasil-Pemeriksaan-Inspektorat>. Diakses 6 Maret 2018

<https://jogja.tribunnews.com/2018/01/11/sebanyak-2299-laporan-dugaan-pelanggaran-pengelolaan-dana-desa-sepanjang-2017>). Diakses 6 Maret 2018.

<https://argodadi.bantulkab.go.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://bantulkab.go.id/profil/>). Diakses 21 Maret 2018

<https://bangunjiwo-bantul.desa.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://guwosari-bantul.desa.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://panggungharjo.desa.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://panjangrejo-bantul.desa.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://parangtritis.bantulkab.go.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://sabdadadi.bantulkab.go.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://sumberagung.bantulkab.go.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://tamantirto.bantulkab.go.id>. Diakses 8 Mei 2018

<https://wijirejo.bantulkab.go.id>. Diakses 8 Mei 2018



# LAMPIRAN



**LAMPIRAN I**  
**Surat Ijin Penelitian**





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

**Nomor : 070 / Reg / 1563 / S1 / 2018**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 2509/R/I  
Tanggal : 23 April 2018  
Perihal : Permohonan Mencari Data

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ELISABET SUTIRAH  
2 NIP/NIM/No.KTP : 3308064211960002  
3 No. Telp/ HP : 085752530523

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN PENERAPAN SPIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL  
b. Lokasi : Inspektorat Kab. Bantul, Desa Sumberagung Kec. Jetis, Desa Panggunharjo Kec. Sewon, Desa Panjangrejo Kec. Pundong, Desa Bangunjiwo Kec. Kasihan, Desa Wijirejo Kab. Pandak, Desa Argodadi Kec. Sedayu, Desa Sabdodadi Kec. Bantul, Desa Parangtritis Kec. Kretek, Desa Guwosari Kec. Pajangan, Desa Tamantirto Kec. Kasihan  
c. Waktu : 27 April 2018 s/d 27 Mei 2018  
d. Status izin : Baru  
e. Jumlah anggota : -  
f. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy (CD)** kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 27 April 2018

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian  
dan Pengembangan u.b. Kasubbid  
Penelitian dan Pengembangan



**TRI SUMATI, SH**

NIP: 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: [www.bappeda.bantulkab.go.id](http://www.bappeda.bantulkab.go.id) Posel: [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

---

**Lampiran Nomor Izin : 070 / Reg / 1563 / S1 / 2018**

9. Camat Sedayu
10. Camat Pajangan
11. Camat Kretek
12. Camat Jetis
13. Lurah Desa Sumberagung, Kec. Jetis
14. Lurah Desa Panggungharjo, Kec. Sewon
15. Lurah Desa Panjangrejo, Kec. Pundong
16. Lurah Desa Tamantirto, Kec. Kasihan
17. Lurah Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan
18. Lurah Desa Wijirejo, Kec. Pandak
19. Lurah Desa Argodadi, Kec. Sedayu
20. Lurah Desa Sabdodadi, Kec. Bantul
21. Lurah Desa Parangtritis, Kec. Kretek
22. Lurah Desa Guwosari, Kec. Pajangan
23. Dekan Fak. Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
24. Yang Bersangkutan



**LAMPIRAN II**  
**Kuesioner Penelitian**

## KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Aparatur Pemerintah Desa

Saya Elisabet Sutirah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

Penelitian yang saya lakukan berjudul “**Pengaruh *Good Governance* dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul**” oleh karena itu saya mengharapkan jawaban atau informasi yang dapat Bapak/Ibu berikan sesuai pendapat pribadi dari apa yang Bapak/Ibu alami. Identitas Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik.

Atas partisipasi dan bantuan Bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Elisabet Sutira

## I. Identitas Responden

Beri tanda centang (✓) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i.

1. Nama : .....
2. Asal Desa : .....
3. Umur : .....
4. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
5. Jabatan :  Kepala Desa  Sekretaris Desa  
 Bendahara Desa  Kaur/Kasi.....
6. Lama Menjabat :  < 1 Tahun  ≥ 1 Tahun
7. Pendidikan Terakhir :  SMA/ Sederajat  Diploma.....  
 S1/S2/S3  Lainnya
8. Latar Belakang Pendidikan:  Ekonomi  Hukum  
 Teknik  Lainnya.....

### Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini digunakan semata-mata untuk keperluan penelitian akademik.
2. Bacalah pertanyaan secara teliti sebelum menjawab pertanyaan.
3. Jawablah **seluruh** pertanyaan dengan jujur (**sesuai dengan yang telah terjadi, bukan merupakan harapan Bapak/Ibu/Saudara/i**). Kerahasiaan jawaban akan sangat dijaga.
4. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sudah disediakan.

**Keterangan :**

Pilihan Jawaban	Keterangan
STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
CS	Cukup Setuju
STS	Setuju
SS	Sangat Setuju

**II. Daftar Pertanyaan Kuesioner**

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i telah berjalan di desa Bapak/Ibu/Saudara/i.

***GOOD GOVERNANCE***

*Good governance* ( tata kelola pemerintahan yang baik) berperan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah desa yang lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik secara ekonomis, efektif dan efisien.

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
<b>Partisipasi (<i>Partisipation</i>)</b>						
1.	Masyarakat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dari pemerintah desa.	STS	TS	CS	S	SS
2.	Seluruh aparatur desa memiliki peran yang aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari memberikan pendapat dan kritik.	STS	TS	CS	S	SS
<b>Kepastian Hukum (<i>Rule of Law</i>)</b>						
3.	Peraturan Desa (Perdes) dan kebijakan publik lainnya disusun demi kepentingan masyarakat.	STS	TS	CS	S	SS
4.	Pemerintah desa menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan telah dilaksanakan tanpa diskriminasi dan adanya benturan kepentingan.	STS	TS	CS	S	SS

<b>Transparansi (<i>Transparency</i>)</b>						
5.	Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa segala proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
6.	Data dan informasi yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diperoleh dengan mudah oleh pengguna informasi.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b><i>Responsiveness</i></b>						
7.	Terdapat sistem pengaduan masyarakat yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
8.	Cepat dan tanggap menindaklanjuti kritik dan saran atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b><i>Consensus Orientation</i></b>						
9.	Rencana kerja Pemerintahan desa disusun berdasarkan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
10.	Pemerintah desa memfasilitasi forum diskusi masyarakat seperti musyawarah dusun, musyawarah desa.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b><i>Equity</i></b>						
11.	Pemerintah desa menyusun program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
12.	Bantuan finansial maupun non finansial dapat diperoleh oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b><i>Efektivitas dan Efesiensi</i></b>						
13.	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program telah sejalan dengan penyusunan APBDesa dan target	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
14.	Penggunaan APBDesa pada pemerintah desa telah sesuai dengan alokasinya	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>

<b>Akuntabilitas</b>						
15.	Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara periodik melalui laporan kinerja dan disampaikan tepat pada waktunya	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
16.	Penyelenggaraan pemerintahan desa telah berorientasi pada prinsip akuntabilitas dengan menerapkan standar operasional yang berlaku .	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Strategic Vision</b>						
17.	Pemerintah desa menyusun visi dan misi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
18.	APBDesa yang disusun dalam pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>

### **PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN ITERN PEMERINTAH (SPIP)**

Pengendalian internal terkait dengan bagaimana individu dalam instansi melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, kebijakan, dan otoritas yang ada secara bersama- sama untuk mencapai tujuan instansi.

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>				
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
19.	Desa telah menerapkan Standar Operating Prosedur (SOP) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
20.	Pelanggaran terhadap SOP sudah diberikan peringatan atau teguran.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Penilaian Risiko</b>						
21.	Ada mekanisme untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian dari tujuan instansi	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
22.	Terdapat penentuan batas dan toleransi untuk risiko kesalahan.	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
23.	Setiap transaksi dan aktivitas dalam rangka	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>

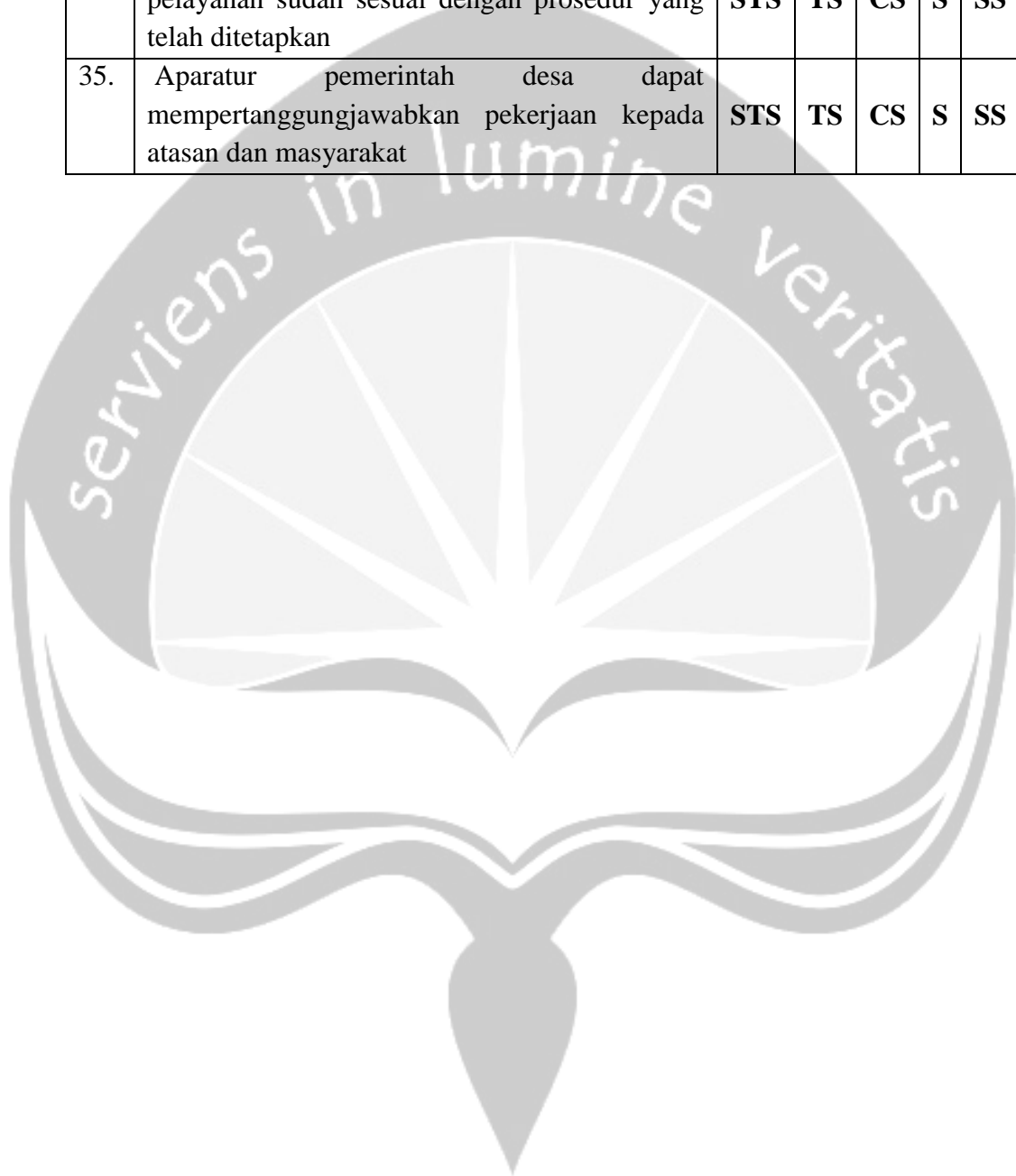


	penyelenggaraan pemerintah desa telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					
24.	Desa telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai.	STS	TS	CS	S	SS
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
25.	Informasi dikomunikasikan secara efektif antara bawahan, atasan maupun antar bagian.	STS	TS	CS	S	SS
26.	Desa telah menyelenggarakan rapat pengendalian yang diikuti aparatur pemerintah secara berkala.	STS	TS	CS	S	SS
<b>Pemantauan</b>						
27.	Desa telah melakukan evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaannya secara berkala.	STS	TS	CS	S	SS
28.	Pemimpin dan atasan melakukan pemeriksaan secara berkala atau dadakan terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa	STS	TS	CS	S	SS

### **KINERJA PEMERINTAH DESA**

Kinerja pemerintah desa merupakan suatu tolok ukur tingkat kemajuan aparatur pemerintah desa atas hasil dan usahanya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.						
No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
29.	Aparatur pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	STS	TS	CS	S	SS
30.	Aparatur pemerintah desa aktif dalam menanggapi keluhan masyarakat.	STS	TS	CS	S	SS
31.	Aparatur pemerintah desa bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya.	STS	TS	CS	S	SS
32.	Aparatur pemerintah desa memanfaatkan waktu bekerja dengan efektif ( mencapai tujuan awal) dan efisien.	STS	TS	CS	S	SS

33.	Aparatur pemerintah desa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi pekerjaan	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
34.	Aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
35.	Aparatur pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada atasan dan masyarakat	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>CS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>





**Lampiran III**  
**Data Jawaban Responden**



16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5			
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
18	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4		
19	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4			
20	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
21	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4		
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	
24	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
25	4	4	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
26	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	
27	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	
28	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
30	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
31	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	
32	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
34	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	







**LAMPIRAN IV**  
**Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**





N		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG4	Pearson Correlation																			
	Sig. (1-tailed)	,241*	0,157	,541**	1	,338**	0,116	,248*	,465**	,487**	0,202	0,2	0,028	0,204	,264*	,275*	,216*	,247*	0,054	,458**
	N	0,032	0,116	0		0,004	0,189	0,028	0	0	0,061	0,063	0,415	0,059	0,021	0,017	0,048	0,029	0,342	0
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG5	Pearson Correlation																			
	Sig. (1-tailed)	,432**	,364**	,277*	,338**	1	,308**	0,208	,454**	0,12	0,199	0,212	,283*	,345**	,332**	,234*	0,157	0,189	0,156	,505**
	N	0	0,002	0,016	0,004		0,008	0,055	0	0,181	0,064	0,052	0,014	0,003	0,005	0,036	0,115	0,074	0,117	0
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG6	Pearson Correlation																			
	Sig. (1-tailed)	,335**	0,074	0,168	0,116	,308**	1	,470**	,236*	0,045	,267*	,403**	,335**	,346**	,269*	,323**	,307**	,303**	,269*	,509**
	N	0,004	0,288	0,099	0,189	0,008		0	0,035	0,366	0,02	0,001	0,004	0,003	0,019	0,006	0,009	0,009	0,019	0
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG7	Pearson Correlation																			
		0,212	0,041	,238*	,248*	0,208	,470**	1	,415**	0,164	0,201	,413**	,504**	,535**	,481**	,535**	,463**	,411**	,481**	,669**





N		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG15	Pearson Correlation																			
	Sig. (1-tailed)	,378**	,370**	,408**	,275*	,234*	,323**	,535**	,443**	,336**	0,193	,459**	,467**	,482**	,499**	1	,547**	,370**	,247*	,721**
	N	0,001	0,002	0,001	0,017	0,036	0,006	0	0	0,004	0,07	0	0	0	0	0	0	0,002	0,029	0
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG16	Pearson Correlation																			
	Sig. (1-tailed)	,312**	0,104	,242*	,216*	0,157	,307**	,463**	,418**	,384**	,265*	,458**	,363**	,319**	,447**	,547**	1	,410**	,235*	,623**
	N	0,008	0,214	0,031	0,048	0,115	0,009	0	0	0,001	0,02	0	0,002	0,006	0	0	0,001	0,035	0	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG17	Pearson Correlation																			
	Sig. (1-tailed)	0,069	,294*	,286*	,247*	0,189	,303**	,411**	,448**	,225*	,381**	,397**	,319**	,496**	,261*	,370**	,410**	1	,466**	,616**
	N	0,3	0,011	0,013	0,029	0,074	0,009	0,001	0	0,042	0,001	0,001	0,006	0	0,022	0,002	0,001	0	0	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
GG18	Pearson Correlation																			
		,239*	,340**	0,112	0,054	0,156	,269*	,481**	0,214	,257*	,317**	,292*	,499**	,557**	,315**	,247*	,235*	,466**	1	,579**





N		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	,733**	,734**	,666**	,742**	,725**	,755**	,679**	,719**	,801**	,830**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

## VARIABEL KINERJA PEMERINTAH DESA

### Correlations

		KINERJA1	KINERJA2	KINERJA3	KINERJA4	KINERJA5	KINERJA6	KINERJA7	TOTAL
KINERJA1	Pearson Correlation	1	,453**	,263*	,232*	,384**	,109	,198	,526**
	Sig. (1-tailed)		,000	,021	,038	,001	,203	,065	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
KINERJA2	Pearson Correlation	,453**	1	,482**	,385**	,387**	,498**	,491**	,725**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,001	,001	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
KINERJA3	Pearson Correlation	,263*	,482**	1	,608**	,435**	,505**	,427**	,741**
	Sig. (1-tailed)	,021	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
KINERJA4	Pearson Correlation	,232*	,385**	,608**	1	,566**	,554**	,469**	,765**
	Sig. (1-tailed)	,038	,001	,000		,000	,000	,000	,000



	N	60	60	60	60	60	60	60	60
KINERJA5	Pearson Correlation	,384**	,387**	,435**	,566**	1	,468**	,491**	,758**
	Sig. (1-tailed)	,001	,001	,000	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
KINERJA6	Pearson Correlation	,109	,498**	,505**	,554**	,468**	1	,764**	,764**
	Sig. (1-tailed)	,203	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
KINERJA7	Pearson Correlation	,198	,491**	,427**	,469**	,491**	,764**	1	,752**
	Sig. (1-tailed)	,065	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	,526**	,725**	,741**	,765**	,758**	,764**	,752**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).



## HASIL UJI RELIABILITAS

### Variabel *Good Governance*

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,893	18

### Variabel Penerapan SPIP

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,908	10

## Variabel Kinerja Pemerintah Desa

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,843	7



**LAMPIRAN V**  
**Uji Normalitas**

## HASIL UJI NORMALITAS

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

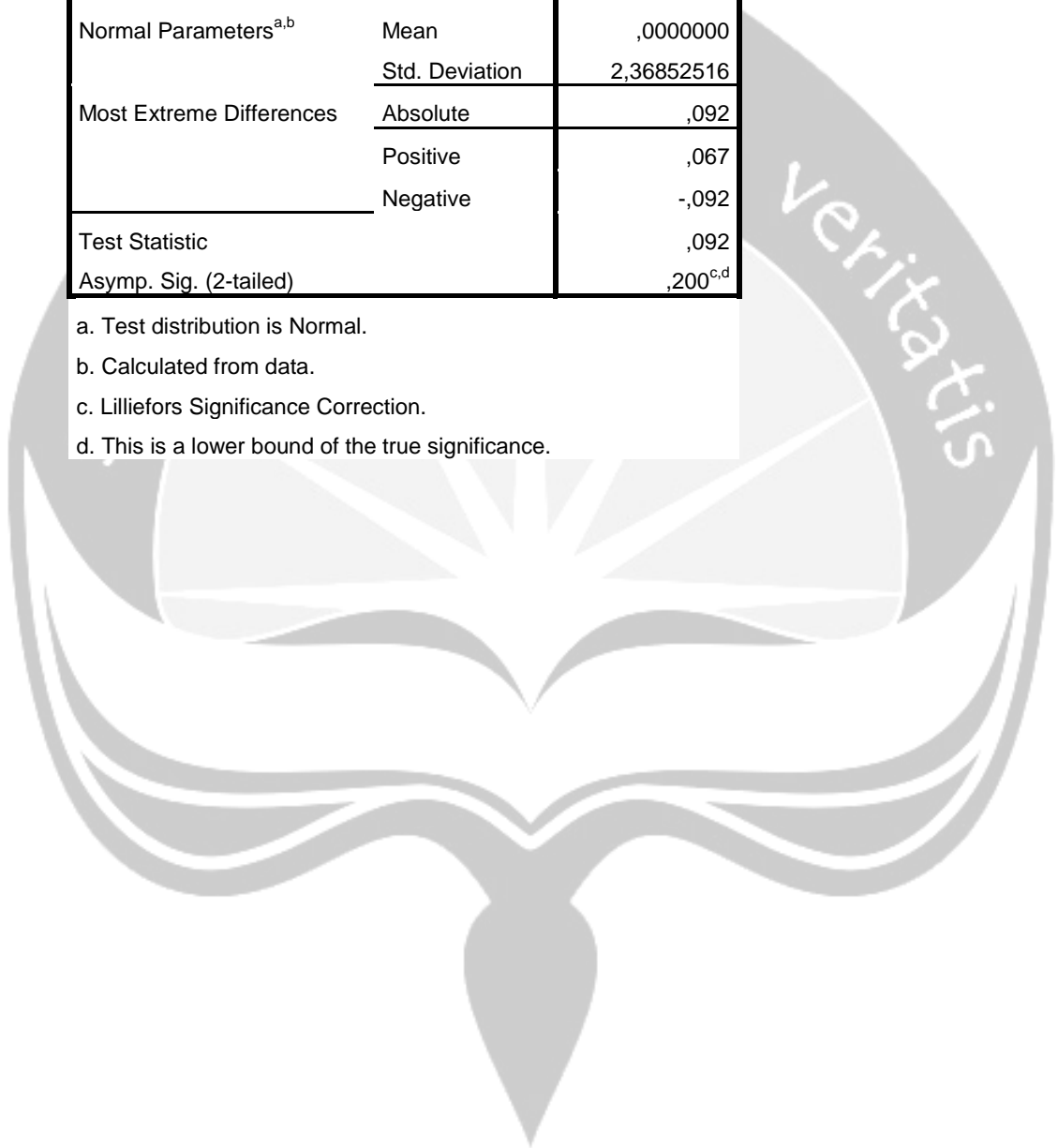
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,36852516
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,067
	Negative	-,092
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.





**LAMPIRAN VI**  
**Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas**

**HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,712	4,331		1,088	,281		
GG	,243	,081	,470	3,004	,004	,397	2,522
SPIP	,142	,094	,236	1,509	,137	,397	2,522

a. Dependent Variable: KINERJA



## UJI HETEROKEDASTISITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,659	2,523		1,450	,153
	GG	-,010	,047	-,043	-,205	,838
	SPIP	-,023	,055	-,090	-,429	,670

a. Dependent Variable: ABS\_RES1







**LAMPIRAN VII**  
**Pengujian Regresi**

## HASIL UJI REGRESI

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,669 <sup>a</sup>	,448	,429	2,410

a. Predictors: (Constant), SPIP, GG

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268,665	2	134,333	23,134	,000 <sup>b</sup>
	Residual	330,985	57	5,807		
	Total	599,650	59			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), SPIP, GG

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,712	4,331		1,088	,281
	GG	,243	,081	,470	3,004	,004
	SPIP	,142	,094	,236	1,509	,137

a. Dependent Variable: KINERJA